

Peran ASEAN Menangani *Global Waste Trade* di Asia Tenggara Pasca *National Sword Policy* China Tahun 2019

Muhamad Syahril Jumhur

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: Sjahriljr88@gmail.com

Abstract

Global waste trade is considered as a normal activity. Developed countries in the north chose to export their waste to developing countries in the south, because it is more economical than managing it themselves domestically. China was the largest importer of plastic waste in the world, before its government adopted the waste import ban policy in 2018. However, after its enforcement, the structure of the global waste trade changed to make Southeast Asia countries the next target for waste exports. ASEAN as a regional organization in Southeast Asia needs to provide a solution to this issue. Therefore, this paper aims to examine ASEAN's role in dealing with the impacts arising from waste trade in the region. This research uses descriptive qualitative methods with secondary sources from scientific articles, reports, news, and official websites. This research explained that the role of ASEAN after China's waste ban import did not directly lead to action against waste trade in the region, so that member states of ASEAN handled this issue individually. ASEAN's role is only to encourage regional action to overcome plastic pollution in ASEAN's oceans as the impact of massive waste trading activities.

Perdagangan sampah global merupakan aktivitas yang sudah dianggap lumrah. Negara-negara maju di utara memilih untuk mengekspor sampahnya ke negara berkembang di selatan, karena biayanya lebih ekonomis daripada mengelola sendiri di dalam negeri. China merupakan importir limbah plastik terbesar di dunia, sebelum pemerintahnya mengadopsi kebijakan ban impor limbah pada tahun 2018. Namun setelah itu, terdapat perubahan struktur perdagangan sampah global yang membuat Asia Tenggara menjadi target ekspor sampah selanjutnya. ASEAN selaku organisasi regional di Asia Tenggara perlu memberikan solusi atas permasalahan ini. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk meneliti bagaimana peran ASEAN dalam menangani dampak yang timbul dari perdagangan sampah di kawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber sekunder dari artikel ilmiah, laporan, berita, dan website

resmi. Dari penelitian ini, ditemukan penjelasan bahwa peran ASEAN pasca ban impor China tidak langsung mengarah pada penindakan terhadap perdagangan sampah di kawasan, sehingga tindakan penanganan perdagangan sampah ditangani secara individu oleh negara anggota. Peran ASEAN hanya mendorong tindakan regional untuk mengatasi polusi plastik di lautan ASEAN yang menjadi dampak dari aktifitas perdagangan sampah yang masif.

Keywords: ASEAN, *Global Waste Trade*, *National Sword Policy*, China

Pendahuluan

Sampah merupakan salah satu masalah global utama yang harus segera diatasi. Sangat perlukan berbagai tindakan pencegahan terhadap membludaknya jumlah sampah yang dibuang. Selain itu pengelolaan sampah yang baik juga dibutuhkan, sehingga tidak mencemari lingkungan. Setiap tahun diperkirakan umat manusia membuang sekitar 2,1 miliar ton sampah ke Bumi. Terdapat delapan jenis sampah yang dibuang, yaitu berupa sampah atau limbah konstruksi, industri, rumah tangga, plastik, elektronik radioaktif, kotoran, dan limbah buangan, seperti pupuk, pestisida, dan minyak dari misalnya pertanian yang mengalir ke air tanah, sungai, dan lautan.¹ Apabila tidak ditangani bersama-sama oleh para aktor internasional, keamanan lingkungan akan semakin terancam yang pada akhirnya dapat membahayakan keamanan manusia (*human security*).

Berdasarkan fenomena tersebut, setiap negara di dunia, baik negara maju dan berkembang, harus saling bekerja sama dalam pengelolaan sampah. Namun, sebagian negara maju memilih untuk “menjual” sampahnya ke negara berkembang, karena dinilai lebih praktis dan murah ongkosnya daripada mengelola di “rumah” sendiri. Mereka memandang perdagangan sampah sebagai cara untuk mengelola sampah secara efisien, mengurangi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lokal, dan untuk memenuhi standar perusahaan dalam pengelolaan.

Secara ekonomis, negara-negara berkembang mendapat keuntungan dari aktivitas perdagangan sampah, karena sebagian dari sampah yang diimpor dapat diolah menjadi bahan baku produksi suatu produk baru. Keuntungan ekonomis berupa nilai kumulatif impor yang diperoleh negara-negara ASEAN, yaitu mencapai USD 10,76 miliar dari tahun 1988 hingga 2017. Di antara negara anggota ASEAN, Thailand dan Malaysia mencatat nilai perdagangan tertinggi.²

China, sebelum pemberlakuan larangan impor sampah 2018, merupakan importir sampah terbesar di dunia. China hampir mengimpor lebih dari setengah jumlah sampah plastik yang diperdagangkan secara global.³ China telah mengimpor limbah plastik tahunan mencapai 8,88 juta ton. Sebanyak 70% dari angka tersebut mengalami salah kelola dengan berakhir di TPA.⁴ Hal ini tentu

dapat memicu kerusakan lingkungan. Pada awalnya, China tidak terlalu memperlmasalahkan aktivitas impor sampahnya, karena China sendiri mendapatkan keuntungan dari perdagangan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, China memutuskan untuk melarang impor sampah ke negrinya, karena dua alasan utama, yaitu *pertama* masalah kesehatan dan keselamatan masyarakat China. Seperti yang kita ketahui, demografi China terlalu padat dan memiliki jumlah populasi terbesar di dunia. Alasan kedua adalah meningkatnya secara signifikan limbah domestik China. Masalah ini membuat pemerintah China cukup kewalahan untuk mengontrol sebagian besar sampah yang masuk dan keluar.⁵

Pada Juli 2017, China memutuskan kebijakan larangan atau ban impor sampah dengan nama "*National Sword Policy*" yang mulai berlaku pada awal Januari 2018. Kebijakan Pedang Nasional China melarang dua puluh empat jenis impor limbah padat dan hanya akan menerima potongan plastik dengan tingkat kontaminasi 0,5% atau kurang dari itu.⁶ Kebijakan tersebut membuat perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada struktur perdagangan sampah plastik global. Perubahan tersebut mendorong negara-negara pengekspor untuk segera mulai mencari negara baru untuk menjadi target kiriman sampah plastik mereka.⁷

Larangan impor sampah yang diberlakukan China memberikan efek limpahan bagi negara berkembang di *Global South*, seperti negara-negara Asia Tenggara. Undang-undang lingkungan dinilai lunak di *Global South*, sehingga rantai pasokan global dapat diuntungkan dari kondisi tersebut. Asia Tenggara menjadi target kawasan selanjutnya untuk menerima kiriman sampah selanjutnya. Hal ini dibuktikan dengan naiknya jumlah ekspor sampah plastik secara signifikan, yaitu mencapai 171% pada tahun 2018.⁸

Menurut data yang dipaparkan di Visual Capitalist, China dapat memotong hampir 99% dari seluruh jumlah impor sampah plastiknya. Sebaliknya, negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia langsung mengalami kenaikan pasca *National Sword Policy* China tersebut.⁹

Walaupun memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi, sampah yang diperdagangkan justru lebih sering menumpuk daripada diolah kembali menjadi produk baru. Sampah-sampah yang menumpuk kebanyakan berakhir di TPA, dibuang ke laut, atau dibakar. Pembakaran sampah menimbulkan emisi yang berbahaya, sehingga itu dapat menimbulkan pencemaran pada lingkungan dan dapat membahayakan masyarakat.¹⁰ Di samping itu, tidak semua limbah yang diekspor dapat digunakan kembali (*reuse*), terutama karena banyak limbah yang salah diberi label, dicampur dengan yang tidak dapat didaur ulang, atau tidak dibersihkan dengan benar.

Perdagangan sampah global juga memiliki masalah besar dalam hal akuntabilitas dan transparansi, karena seringkali terjadi perdagangan sampah ilegal. Hal itu membuat perdagangan sampah global sulit dikontrol pemerintah setempat.¹¹ Oleh karena itu, dari permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan peran organisasi regional yang dapat mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari *Global Waste Trade* di suatu kawasan. Organisasi regional di Asia Tenggara, yaitu ASEAN, perlu memutuskan langkah bersama untuk menangani permasalahan ini. Tulisan ini berupaya meneliti bagaimana peran ASEAN dalam menangani perdagangan sampah global terutama setelah larangan impor sampah China.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder yang dominan diperoleh dari artikel jurnal, laporan, dan beragam artikel ilmiah dan/atau informasi yang berasal dari platform berita atau website resmi. Studi pustaka menjadi teknik pengumpulan data pada *paper* penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan, mekanisme, atau aturan yang dihasilkan ASEAN berkaitan dengan perdagangan sampah. Penelitian ini akan memaparkan terlebih dahulu berbagai tindakan global terdahulu dalam menghadapi *global waste trade*. Selain itu, penelitian ini didukung kerangka berpikir berupa:

Global Waste Trade

Perdagangan sampah global merupakan aktivitas mengekspor atau mengirim (*shipment*) sampah oleh negara eksportir ke negara lain, lalu negara penerima (importir) memperoleh uang untuk mengolah atau membuang sampah tersebut di wilayahnya. Pelaku ekspor sampah dominan berasal dari *Global North* atau negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Inggris. Sedangkan negara-negara pengimpor biasanya berasal dari belahan Bumi bagian selatan atau *Global South*, seperti negara anggota ASEAN, meliputi Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Vietnam.

Aktivitas perdagangan ini mulai populer sejak tahun 1970-an. Pada era itu, baik negara maju maupun berkembang saling mengejar pertumbuhan ekonomi. Walaupun mereka telah mempertimbangkan kerusakan lingkungan, tindakan pencegahannya terhitung masih sedikit. Diperkirakan jutaan ton sampah telah diperdagangkan pada periode tersebut.¹²

Global Supply Chain

Secara bahasa *supply chain* adalah rantai pasok. *Supply chain* sangat berkaitan dengan aktivitas produksi, karena ia merupakan rantai dari bahan mentah sampai barang jadi yang sampai ke konsumen. Rantai pasok adalah rangkaian hubungan dari produsen, seperti perusahaan dengan pemasoknya

yang menyediakan bahan mentah untuk memproduksi suatu produk, lalu mendistribusikannya kepada pembeli akhir (konsumen).

Untuk menghasilkan produk yang efisien, suatu perusahaan tentu menerapkan manajemen rantai pasok (*supply chain management*) agar dalam proses produksi mendapatkan bahan-bahan berkualitas yang tidak terlalu mahal, sehingga ongkos produksi bisa ditekan dan harga produk dapat menjadi terjangkau di masyarakat.¹³ Misalnya produsen mobil tentu pada awal-awal mengumpulkan bahan-bahan mentahnya terlebih dahulu dari perusahaan lain, seperti kaca, mesin, ban, dan sebagainya. Di era globalisasi produksi saat ini, setiap perusahaan berusaha memanfaatkannya agar dapat menekan biaya produksi seminimal mungkin, sampai-sampai perusahaan-perusahaan negara maju memilih lokasi produksinya di negara-negara berkembang karena biaya pajak dan buruh yang murah dibanding di negara asalnya.

Dalam permasalahan perdagangan sampah ini, *global supply chain* berpengaruh pada perpindahan sampah dari negara maju ke negara berkembang. Rantai pasokan global terkenal diuntungkan dari undang-undang lingkungan yang lunak di *Global South*. Ditambah lagi keuntungan ekonomi yang ditawarkan dari menerima sampah yang diekspor, sehingga hal tersebut membuat perdagangan sampah dianggap sebagai solusi yang saling menguntungkan.¹⁴

Keamanan Lingkungan

Keamanan lingkungan merupakan salah satu poin dari 7 poin dalam pendekatan keamanan manusia. Keamanan lingkungan dinilai sebagai inti dari keamanan manusia (*human security*), karena permasalahannya sudah cukup genting dan dapat memusnahkan umat manusia. Dapat dilacak ke Human Development Report tahun 1994 bahwa UNDP merinci kemungkinan dampak perubahan iklim yang menyedihkan terhadap kehidupan di seluruh dunia.¹⁵

Di antara permasalahan tersebut, keamanan lingkungan menyerukan perlindungan warga dari sumber daya dan ancaman lingkungan dan konflik yang menimbulkan risiko perubahan lingkungan—berturut-turut mendesak dilaksanakannya pembangunan berketahanan iklim sebagai sarana untuk menjamin perdamaian dan kemakmuran, sebagaimana tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Perdagangan sampah menjadi salah satu ancaman keamanan lingkungan, khususnya bagi negara importir yang didominasi negara berkembang, karena limbah dalam negeri di negara berkembang sendiri belum tentu bisa diolah dengan baik, apalagi ditambah impor ratusan ton sampah dari luar.

Pelestarian lingkungan merupakan usaha yang penting untuk menjaga keamanan seluruh dunia. Pada awalnya memang diremehkan dalam

pendekatan keamanan tradisional. Namun seiring berjalannya waktu, karena pendekatan tradisional terhadap keamanan dianggap ketinggalan zaman dan tidak cukup dalam menangani masalah kerapuhan dan kerentanan, dunia telah melihat perubahan dari gagasan realis klasik ke jaminan keamanan manusia, yang merupakan paradigma baru sekuritisasi yang memprioritaskan penegakan hak asasi manusia dan memerangi kerentanan.

Perdagangan sampah global di Asia Tenggara

Perdagangan sampah global merupakan praktik umum yang dilakukan negara-negara di dunia di era 1970-an, karena industri bahan sekunder menjadi penting sejak revolusi industri. Diperkirakan, dalam satu dekade tersebut, telah diekspor 30 sampai 45 juta ton sampah beracun dari negara-negara industri ke negara berkembang. Aktivitas perdagangan tersebut, sebelum dan sesudah diatur Konvensi Basel 1992, masih merupakan industri multi-miliar dolar.¹⁶

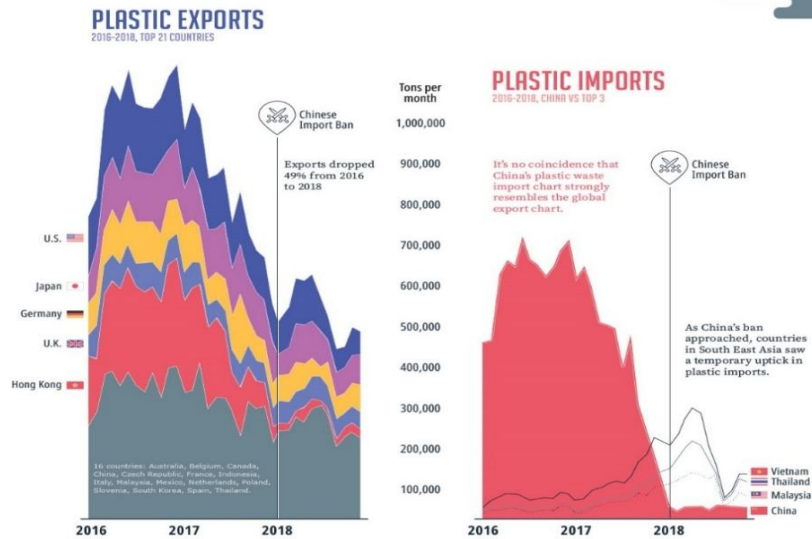
Menurut data yang diambil dari United Nations Commodity Trade Database, nilai ekspor dan impor sampah global pada 2017 sebelum larangan impor sampah China masing-masing mencapai USD 4,5 miliar dan 6,1 miliar.¹⁷ Lalu pada 2021, angka tersebut menurun, nilai impor menjadi USD 3,1 miliar dan nilai ekspor menjadi USD 3,3 miliar menurut data dari Trade Map.¹⁸

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nilai impor negara ASEAN dari 1988-2017 mencapai USD 10,76 miliar. Impor tahunan negara ASEAN pun melonjak sekitar 171% setelah pemberlakuan ban impor China pada 2018. *National Sword Policy* China mengubah secara signifikan rantai pasok global perdagangan ini menuju kawasan Asia Tenggara.

Pada tahun 2016, jumlah impor plastik di negara-negara ASEAN berjumlah 836.529 ton, lalu naik menjadi 2.231.127ton pada tahun 2018. Seperti data yang dipaparkan di Tabel 1.1. Negara-negara ASEAN langsung menjadi *Top Importers* di tahun tersebut. Per Januari-November 2018, Malaysia menempati urutan pertama dengan jumlah impor mencapai 872.762 ton, diikuti Thailand dengan 552.606 ton.¹⁹

Memang pada tahun 2021, impor sampah plastik tersebut sudah menurun di Malaysia dengan angka 405.010ton dan Thailand di angka 158.815 ton. Indonesia sendiri juga mengalami penurunan jumlah impor sampah plastik dari 320.451ton pada 2018 menjadi 164.416 ton di 2021.²⁰ Berikut tabel lebih lengkap mengenai impor sampah dari sebagian negara ASEAN (dalam ton) di Tabel 1.2:

Tabel 1.1 Data impor dan ekspor sampah plastik global



Source: Visual Capitalist.com

Tabel 1.2 Data impor sampah plastik negara anggota ASEAN

No	Negara Anggota ASEAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Malaysia	549.786	872.762	333.500	478.092	405.010
2	Thailand	152.244	552.606	316.408	137.189	158.815
3	Vietnam	149.928	190.967	279.718	328.875	No Data
4	Indonesia	128.866	320.451	249.618	181.719	164.416
5	Filipina	3.776	11.900	15.489	6.709	13.375

Source: ITC – Trade Map

Walaupun mengalami pelonjakan yang signifikan di tahun 2018, impor sampah plastik di negara ASEAN relatif mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Itu menunjukkan terdapat upaya yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut, baik melalui tindakan kolektif maupun individu.

Malaysia yang dikenal sebagai destinasi ekspor sampah utama setelah *National Sword Policy* China 2018 telah berupaya mengurangi jumlah sampah yang diimpor, khususnya sampah ilegal, baik dengan penindakan maupun regulasi. Malaysia akan mengambil tindakan-tindakan untuk memastikan negaranya tidak menjadi "tempat pembuangan sampah dunia". Pada awal 2020, Malaysia telah mengembalikan 42 kontainer sampah impor ilegal ke negara asalnya, yaitu Inggris. Malaysia telah mengirim kembali 150 kontainer yang berisi sekitar 3.737 metrik ton *unwanted waste* ke negara asalnya di tahun tersebut.²¹ Lalu pada tahun 2021, total Malaysia telah mengembalikan impor sampah plastik ilegal berjumlah 267 kontainer sejak 2019 dan 81 kontainer sedang dalam proses pengembalian. Sampah ilegal tersebut dominan dikirim oleh AS, Kanada, dan negara Uni Eropa, seperti Inggris dan Perancis.²²

Selain itu, Malaysia telah menerbitkan regulasi dan panduan baru untuk ekspor sampah ke negaranya. Sampah jenis limbah dan skrap besi dan peleburan kembali potongan besi atau baja (kode HS: 7204); limbah dan skrap tembaga (kode HS: 7404); dan limbah atau skrap aluminium (kode HS: 7602) tidak boleh mengandung elemen jejak atau terkontaminasi oleh bahan yang diklasifikasikan dalam the Environmental Quality Act (Scheduled Waste) Regulations 2005 dan *hazardous waste* yang dijelaskan dalam Basel Convention (akan dijelaskan di subbab selanjutnya). Pihak-pihak yang ingin mengimpor juga harus memenuhi syarat berupa produsen dengan Izin Manufaktur (*Manufacture License/ML*) yang disetujui oleh Kementerian Antarbangsa dan Industri Malaysia; atau manufaktur yang telah diterbitkan surat konfirmasi untuk perusahaan yang dikecualikan dari Izin Manufaktur (ML) yaitu yang sesuai dengan The Industrial Co-ordination Act 1975.²³

Thailand pada 2019 telah memberlakukan larangan impor sampah rumah tangga dan mengumumkan rencana untuk melarang semua impor limbah plastik setelah masa tenggang dua tahun. Kebijakan tersebut akan diberlakukan secara bertahap sejak tahun tersebut sampai akhirnya di 2025.²⁴

Indonesia pada tahun 2019 telah mengembalikan sekitar 68 kontainer sampah impor ke negara asalnya. Sekitar 58 kontainer dikirim kembali ke AS,²⁵ dan sisanya ke Kanada, Perancis, dan Hongkong.²⁶ Alasan pengembalian tersebut dikarenakan tercampurnya sampah potongan kertas dengan sampah lain, seperti karet dan popok bekas. Sebagian kontainer juga kepadatan tercampur dengan zat berbahaya dan melanggar perizinan impor. Indonesia pada dasarnya masih mengizinkan impor sampah, namun hanya sampah yang non-B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri

Perdagangan no. 31 tahun 2016. Selain itu, Indonesia masih mengizinkan impor sampah dengan batas kontaminasi maksimal 2%, sampah tersebut meliputi sampah kertas dan logam.²⁷

Filipina menegaskan posisinya sebagai penolak perdagangan sampah ilegal dengan segera mengembalikan sampah ekspor ilegal ke asal negaranya. Terdapat 51 kontainer sampah campur dikembalikan ke Korea Selatan dan 69 kontainer sampah ke Kanada pada 2019. Selain itu, **Vietnam** memilih untuk lebih menangguk lisensi impor sampah, demi membatasi jumlah sampah yang masuk ke negaranya.²⁸

Demikian usaha-usaha negara-negara ASEAN dalam menangkai perdagangan sampah global, khususnya yang ilegal. Mereka tidak langsung menetapkan kebijakan larangan impor yang dapat memotong secara signifikan jumlah sampah yang diimpor, seperti Kebijakan Pedang Nasional China yang telah memotong 99% kuantitas impor sampah China, Mereka lebih memilih melakukannya secara bertahap, seperti reeksport sampah ilegal dan pengetatan perijinan impor, karena tidak bisa dipungkiri bahwa perdagangan sampah global memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Basel Convention and Basel Ban Amendment

Basel Convention dan Basel Ban Amendment merupakan kesepakatan internasional yang berlaku mengatur perdagangan sampah global. Basel Convention dengan nama lengkap *The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* adalah kesepakatan internasional yang mengatur pengendalian perpindahan lintas batas negara dari sampah berbahaya dan pembuangannya. Perjanjian yang disepakati di Basel, Swiss tersebut diadopsi pada 22 Maret 1989 dan mulai berlaku pada 5 Mei 1992. Basel Convention merupakan salah satu perjanjian multilateral tentang lingkungan yang diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia, yaitu saat artikel ini ditulis mencapai 190 negara. Seluruh negara anggota ASEAN tercatat telah meratifikasi perjanjian tersebut, tetapi negara pengekspor sampah terbesar di dunia yaitu AS belum meratifikasinya.²⁹ Hal tersebut dapat menjadi faktor masih masifnya perdagangan sampah global.

Basel Convention memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak yang negatif dan merugikan dari sampah yang berbahaya (*hazardous*). *Hazardous waste* yang dimaksud adalah limbah yang beracun, eksplosif, korosif, mudah terbakar, mencemari lingkungan, dan terinfeksi. Hal tersebut memang bersesuaian dengan konsep keamanan lingkungan yang merupakan bagian dari keamanan manusia. Perjanjian ini memiliki badan untuk membantu penerapan dan penegakannya di negara-negara yang meratifikasi. Badan tersebut bernama *Environmental Network for Optimizing Regulatory Compliance on Illegal Traffic (ENFORCE)*.³⁰

Secara individu, negara anggota ASEAN telah menerapkan Basel Convention melalui regulasi dan kebijakan yang ditetapkan, seperti yang telah dirinci pada subbab sebelumnya. Sedangkan ASEAN berperan mengakomodasi deklarasi bersama mengenai pengelolaan limbah dan bahan kimia berbahaya pada 2017.

Namun diakui bahwa perjanjian ini tidak cukup mengatasi dan membatasi masifnya jumlah perpindahan limbah berbahaya, karena perdagangan sampah dalam jumlah besar dari Utara ke Selatan masih sering terjadi. Masalah. Selain merupakan isu keamanan lingkungan, perdagangan sampah ini juga termasuk masalah keadilan lingkungan.

Kekhawatiran tersebut mendorong amandemen Basel Convention pada 1995 berupa penambahan, kewajiban bagi pihak-pihak yang terdaftar di Annex VII, yaitu meliputi negara anggota the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Uni Eropa, dan Liechtenstein. Ban Amandemen 1995 ini melarang perpindahan lintas batas dan semua pengiriman limbah berbahaya ke negara-negara yang tidak termasuk dalam Annex VII tadi.³¹ Namun melalui proses yang panjang, amandemen itu baru menjadi hukum internasional dan berlaku setelah 24 tahun kemudian, pada Desember 2019. Pada awalnya, negara anggota ASEAN yang sudah meratifikasi amandemen ini hanya Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Lalu Thailand menyusul pada 2023 dengan menerima amandemen tersebut.³²

Hambatan sebagian negara anggota ASEAN untuk meratifikasi ban amandemen adalah karena mereka masih bersedia menerima pengiriman sampah dalam jumlah besar dari negara eksportir, meliputi negara UE dan Inggris, seperti Vietnam. Vietnam pada November 2021 telah menerima 16 kontainer sampah yang dikirim oleh Jerman. Undang-undang pelarangan impor limbah plastik Vietnam sendiri baru akan berlaku pada 2025.³³

Sedangkan Filipina mengalami hambatan dalam negerinya sendiri dalam ratifikasi undang-undang larangan menyeluruh atas semua impor limbah. Undang-undang Filipina dinilai sangat longgar, karena dapat meloloskan perdagangan sampah ilegal dan bisa diatur menjadi legal. Hal tersebut yang membuat Filipina belum meratifikasi Basel Ban Amandement.³⁴

Peran ASEAN dalam Menangani *Global Waste Trade* di Asia Tenggara

Sebelum Kebijakan Pedang Nasional China berlaku di tahun 2018, negara-negara anggota ASEAN telah mengadopsi deklarasi bersama yaitu *the ASEAN Joint Declaration on Hazardous Chemical and Waste Management* pada 2017. Deklarasi tersebut menyerukan kepada negara anggota untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasinya menuju pembentukan lingkungan yang sehat dan aman untuk pengelolaan bahan kimia dan limbah berbahaya, termasuk melalui

langkah-langkah pencegahan, pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan (*prevention, reduction, reuse, recycle, and recovery*).

Seruan ini mencakup pembangunan jaringan bersama di antara negara anggota untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol atas perdagangan bahan kimia dan limbah berbahaya; dan meningkatkan pertukaran informasi untuk mencegah perdagangan sampah ilegal di kawasan ASEAN. Secara khusus, deklarasi tersebut juga mendorong negara anggota untuk meratifikasi amandemen ban Basel, dan mempercepat implementasinya. Namun saat ini, baru tiga negara ASEAN yang meratifikasinya, seperti yang telah disebutkan di atas.³⁵

Namun, setelah ban impor China diberlakukan yang berdampak besar atas meningkatnya jumlah impor sampah di negara anggota ASEAN, ASEAN belum lagi membuat kebijakan baru yang secara khusus menangani permasalahan *transboundary movement* dari sampah berbahaya dan perdagangan sampah ilegal. Melihat dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-32 2018 di Singapura sampai KTT ke-43 di Indonesia tahun 2023, tidak ada pembahasan khusus mengenai permasalahan perdagangan sampah global.³⁶ Padahal tahun 2018 merupakan gencar-gencarnya aktivitas perdagangan sampah global di Asia Tenggara.

Tetapi di sisi lain, ASEAN telah menyusun cetak biru atau *blueprint* rencana strategis jangka panjang untuk perlindungan lingkungan di Asia Tenggara. The ASEAN Community Vision 2025 diadopsi untuk menetapkan langkah-langkah umum untuk perlindungan terhadap keamanan lingkungan ASEAN. Deklarasi Bersama 2017 di atas juga merupakan bagian dari visi ini. Visi 2025 memiliki tujuh strategi prioritas bagi negara anggota, yaitu meliputi konservasi alam dan keanekaragaman hayati; lingkungan pesisir dan laut; Pengelolaan sumber daya air; kota-kota ramah lingkungan; perubahan iklim; bahan kimia dan limbah; pendidikan lingkungan; konsumsi dan produksi berkelanjutan.³⁷

Selain itu, pada 2019 di KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand, negara anggota menyepakati deklarasi bersama mengenai permasalahan sampah plastik yang tersebar di lautan ASEAN. Hal itu sebagai bentuk penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan dari perdagangan sampah di Asia Tenggara. Deklarasi yang bernama *the Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in the ASEAN Region* memiliki empat bidang prioritas yaitu: (i) Dukungan Kebijakan dan Perencanaan; (ii) Riset, Inovasi, dan Peningkatan Kapasitas; (iii) Kesadaran Publik, Pendidikan, dan Penjangkauan; dan (iv) Keterlibatan Sektor Swasta. Dari situ, ASEAN berperan mendorong negara anggota agar berkomitmen untuk memperkuat langkah bersama dan tingkat nasional untuk mencegah dan mengurangi sampah laut, terutama dari aktivitas berbasis darat.³⁸

Agar deklarasi tersebut dapat terealisasi, diadopsi kerangka kerja lebih lanjut bernama *the ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* (2021-2025) pada Mei 2021. Rencana Aksi Regional ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi di tingkat regional dan internasional untuk mencapai pengelolaan lingkungan pesisir dan laut yang berkelanjutan melalui respons terhadap polusi plastik laut.³⁹ Dari kebijakan-kebijakan tersebut, ASEAN tetap berperan dalam perlindungan lingkungan di Asia Tenggara, tetapi tidak secara konkrit atau langsung melakukan atau mendorong langkah kolaboratif untuk menangani permasalahan perdagangan sampah di Asia Tenggara, khususnya setelah kebijakan ban impor China tahun 2018.

Conclusion

Perdagangan sampah global merupakan kegiatan yang menimbulkan berbagai permasalahan. Walaupun di satu sisi aktivitas tersebut memiliki keuntungan ekonomis. Perdagangan sampah memiliki banyak permasalahan, seperti minimnya akuntabilitas dan transparansi, beredarnya perdagangan ilegal, menumpuknya sampah yang tidak bisa diolah, perpindahan sampah beracun, dan tentunya pencemaran lingkungan di negara pengimpor.

Setelah China memberlakukan ban impor sampah tahun 2018, Kawasan Asia Tenggara menjadi destinasi utama para eksportir sampah. Hal tersebut membuat impor sampah negara anggota ASEAN meningkat tajam pada 2018. Meskipun begitu, impor sampah plastik di negara anggota ASEAN relatif mengalami penurunan di tahun-tahun setelahnya. Negara anggota ASEAN secara mandiri menangani permasalahan tersebut secara bertahap, seperti pengembalian berton-ton sampah ilegal ilegal dan pengetatan perijinan impor.

ASEAN belum lagi membuat kebijakan baru pasca 2018 yang secara khusus menangani permasalahan perdagangan sampah. Namun ASEAN telah merancang Visi 2025 yang memiliki tujuh strategi prioritas bagi negara anggota mengenai ketahanan lingkungan. Visi tersebut didukung oleh implementasi berbagai rencana aksi regional. Oleh karena itu, ASEAN tetap berperan dalam perlindungan lingkungan di Asia Tenggara, tetapi tidak secara langsung melakukan atau mendorong langkah bersama untuk menangani permasalahan perdagangan sampah di Asia Tenggara.

Endnotes

¹ The World Counts, "Global Waste Problem," Accessed March 29, 2021, <https://www.theworldcounts.com/challenges/planet-earth/waste/global-waste-problem>.

² Margareth Sembiring, "Global Waste Trade Chaos: Rising Environmentalism or Cost-Benefit Analysis?," n.d.

³ Yeeun Uhm, "PLASTIC WASTE TRADE IN SOUTHEAST ASIA AFTER CHINA'S IMPORT BAN: IMPLICATIONS OF THE NEW BASEL CONVENTION AMENDMENT AND RECOMMENDATIONS FOR THE FUTURE," *California Western Law Review* 57, no. 1 (2021).

⁴ Zongguo Wen et al., "China's Plastic Import Ban Increases Prospects of Environmental Impact Mitigation of Plastic Waste Trade Flow Worldwide," *Nature Communications* 12, no. 1 (January 18, 2021): 425, <https://doi.org/10.1038/s41467-020-20741-9>.

⁵ "Piling Up: How China's Ban on Importing Waste Has Stalled Global Recycling," Yale E360, Accessed March 29, 2021, <https://e360.yale.edu/features/piling-up-how-chinas-ban-on-importing-waste-has-stalled-global-recycling>.

⁶ Ying Xia and I Introduction, "CHINA'S ENVIRONMENTAL CAMPAIGN: HOW CHINA'S 'WAR ON POLLUTION' IS TRANSFORMING THE INTERNATIONAL TRADE IN WASTE" 51 (n.d.).

⁷ Uhm, "PLASTIC WASTE TRADE IN SOUTHEAST ASIA AFTER CHINA'S IMPORT BAN: IMPLICATIONS OF THE NEW BASEL CONVENTION AMENDMENT AND RECOMMENDATIONS FOR THE FUTURE."

⁸ Greenpeace, "South Asia's Struggle Against The Plastic Waste Trade," n.d., <https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/2559/southeast-asias-struggle-against-the-plastic-waste-trade/>.

⁹ Iman Ghosh, "Mapping the World's Plastic Waste Flows: Top Importers and Exporters," Accessed March 29, 2021, <https://www.visualcapitalist.com/mapping-the-flow-of-the-worlds-plastic-waste/>.

¹⁰ "Trash Trade Wars: Southeast Asia's Problem With the World's Waste," Council on Foreign Relations, Accessed March 29, 2021, <https://www.cfr.org/in-brief/trash-trade-wars-southeast-asias-problem-worlds-waste>.

¹¹ Benedetta Cotta, "What Goes around, Comes around? Access and Allocation Problems in Global North-South Waste Trade | International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics," Accessed March 29, 2021, <https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-020-09479-3>.

¹² Atty Gregorio Rafael Bueta, "Waste Trade in Southeast Asia: Legal Justifications for Regional Actions" (EcoWaste Coalition, July 2021).

¹³ Muhammad Idris, "Apa Itu Supply Chain: Pengertian, Manfaat, Dan Contoh Prosesnya Halaman All - Kompas.Com," Accessed March 29, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/07/17/100454626/apa-itu-supply-chain-pengertian-manfaat-dan-contoh-prosesnya?page=all>.

¹⁴ Helena Varkkey, "By Exporting Trash, Rich Countries Put Their Waste out of Sight and out of Mind," Accessed March 29, 2021, <https://edition.cnn.com/2019/07/29/opinions/by-exporting-trash-rich-countries-put-their-waste-out-of-sight-and-out-of-mind-varkkey/index.html>.

¹⁵ Lorraine Elliott, "Human Security/Environmental Security," *Contemporary Politics* 21, no. 1 (January 2, 2015): 11–24, <https://doi.org/10.1080/13569775.2014.993905>.

¹⁶ Bueta, "Waste Trade in Southeast Asia: Legal Justifications for Regional Actions."

¹⁷ "Plastic Waste Trade, HS Code. No. 391510, 391520, 391530, and 391590 in 2017," Accessed March 29, 2021, <https://comtradeplus.un.org/>.

¹⁸ "Trade Map - List of Exporters for the Selected Product in 2022 (Waste, Parings and Scrap, of Plastics)," Accessed March 29, 2021, https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c3915%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1.

-
- ¹⁹ Ghosh, "Mapping the World's Plastic Waste Flows: Top Importers and Exporters."
- ²⁰ "Trade Map - List of Supplying Markets for a Product Imported by Indonesia," Accessed March 29, 2021, https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c360%7c%7c%7c%7c3915%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1.
- ²¹ "Malaysia Returns 42 Containers of 'illegal' Plastic Waste to UK," Accessed March 29, 2021, <https://www.bbc.com/news/uk-51176312>.
- ²² "Malaysia Sends Back over 300 Containers of Illicit Plastic Waste | Reuters," Accessed March 29, 2021, <https://www.reuters.com/article/malaysia-environment-plastic-idINKBN2BT29/>.
- ²³ SIRIMQAS, "Guidlines for the Importation and Inspection of Metal Scrap," January 2022, <https://www.sirim-qas.com.my/wp-content/uploads/2022/01/Guidelines-for-Importation-and-Inspection-of-Metal-Scrap-rev07012022-CLEANCOPY.pdf>.
- ²⁴ "Thailand's Plastic Waste Ban Won't Help Locals For Decades," Accessed March 29, 2021, <https://www.bloomberg.com/features/2022-thailand-plastic-waste-recycling-import-ban/>.
- ²⁵ Basten Gokkon, "Indonesia Re-Exporting Illegal Waste to Other Countries, Report Finds," Mongabay Environmental News, November 7, 2019, <https://news.mongabay.com/2019/11/indonesia-waste-plastic-export-import-illegal/>.
- ²⁶ "Indonesia Sends Back 100 Tonnes of Waste Including Plastics to US | World News | Sky News," Accessed March 29, 2021, <https://news.sky.com/story/indonesia-sends-back-100-tonnes-of-waste-including-plastics-to-us-11743446>.
- ²⁷ Corin Williams, "Indonesia to Allow Waste Imports with 2% Contamination Limit," *MRW* (blog), July 19, 2021, <https://www.mrw.co.uk/news/indonesia-to-allow-waste-imports-with-2-contamination-limit-19-07-2021/>.
- ²⁸ Hillary Leung, "Southeast Asia Pushes Back Against Global Garbage Trade," *TIME*, June 3, 2019, <https://time.com/5598032/southeast-asia-plastic-waste-malaysia-philippines/>.
- ²⁹ Bueta, "Waste Trade in Southeast Asia: Legal Justifications for Regional Actions."
- ³⁰ "Parties to the Basel Convention," Accessed March 29, 2021, <https://www.basel.int/default.aspx?tabid=4499>.
- ³¹ Bueta, "Waste Trade in Southeast Asia: Legal Justifications for Regional Actions."
- ³² "Parties to the Basel Convention."
- ³³ "Waste Trade Bites: Vietnam Waste Woes | Break Free From Plastic," Accessed March 29, 2021, <https://www.breakfreefromplastic.org/2022/05/09/waste-trade-bites-vietnam-waste-woes/>.
- ³⁴ "Philippines Is Not a Dumping Ground: Inquirer | The Straits Times," Accessed March 29, 2021, <https://www.straitstimes.com/asia/philippines-is-not-a-dumping-ground-inquirer>.
- ³⁵ Bueta, "Waste Trade in Southeast Asia: Legal Justifications for Regional Actions."
- ³⁶ "ASEAN Summit - ASEAN Main Portal," 2024, <https://asean.org/about-asean/asean-summit/>.
- ³⁷ Bueta, "Waste Trade in Southeast Asia: Legal Justifications for Regional Actions."
- ³⁸ Bueta.
- ³⁹ Bueta.

Referensi

"ASEAN Summit - ASEAN Main Portal," 2021. <https://asean.org/about-asean/asean-summit/>.

Bueta, Atty Gregorio Rafael. "Waste Trade in Southeast Asia: Legal Justifications for Regional Actions." *EcoWaste Coalition*, July 2021.

-
- Cotta, Benedetta. "What Goes around, Comes around? Access and Allocation Problems in Global North–South Waste Trade | International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics." Accessed March 29, 2021. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-020-09479-3>.
- Council on Foreign Relations. "Trash Trade Wars: Southeast Asia's Problem With the World's Waste." Accessed March 29, 2021. <https://www.cfr.org/in-brief/trash-trade-wars-southeast-asias-problem-worlds-waste>.
- Counts, The World. "Global Waste Problem." Accessed March 29, 2021. <https://www.theworldcounts.com/challenges/planet-earth/waste/global-waste-problem>.
- Elliott, Lorraine. "Human Security/Environmental Security." *Contemporary Politics* 21, no. 1 (January 2, 2015): 11–24. <https://doi.org/10.1080/13569775.2014.993905>.
- Ghosh, Iman. "Mapping the World's Plastic Waste Flows: Top Importers and Exporters." Accessed March 29, 2021. <https://www.visualcapitalist.com/mapping-the-flow-of-the-worlds-plastic-waste/>.
- Gokkon, Basten. "Indonesia Re-Exporting Illegal Waste to Other Countries, Report Finds." Mongabay Environmental News, November 7, 2019. <https://news.mongabay.com/2019/11/indonesia-waste-plastic-export-import-illegal/>.
- Greenpeace. "South Asia's Struggle Against The Plastic Waste Trade," n.d. <https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/2559/southeast-asias-struggle-against-the-plastic-waste-trade/>.
- Idris, Muhammad. "Apa Itu Supply Chain: Pengertian, Manfaat, Dan Contoh Prosesnya Halaman All - Kompas.Com." Accessed March 29, 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/07/17/100454626/apa-itu-supply-chain-pengertian-manfaat-dan-contoh-prosesnya?page=all>.
- "Indonesia Sends Back 100 Tonnes of Waste Including Plastics to US | World News | Sky News." Accessed March 29, 2021. <https://news.sky.com/story/indonesia-sends-back-100-tonnes-of-waste-including-plastics-to-us-11743446>.
- Leung, Hillary. "Southeast Asia Pushes Back Against Global Garbage Trade." TIME, June 3, 2019. <https://time.com/5598032/southeast-asia-plastic-waste-malaysia-philippines/>.

“Malaysia Returns 42 Containers of ‘illegal’ Plastic Waste to UK.” Accessed March 29, 2021. <https://www.bbc.com/news/uk-51176312>.

“Malaysia Sends Back over 300 Containers of Illicit Plastic Waste | Reuters.” Accessed March 29, 2021. <https://www.reuters.com/article/malaysia-environment-plastic-idINKBN2BT29I/>.

“Parties to the Basel Convention.” Accessed March 29, 2021. <https://www.basel.int/default.aspx?tabid=4499>.

“Philippines Is Not a Dumping Ground: Inquirer | The Straits Times.” Accessed March 29, 2021. <https://www.straitstimes.com/asia/philippines-is-not-a-dumping-ground-inquirer>.

“Plastic Waste Trade, HS Code. No. 391510, 391520, 391530, and 391590 in 2017.” Accessed March 29, 2021. <https://comtradeplus.un.org/>.

Sembiring, Margareth. “Global Waste Trade Chaos: Rising Environmentalism or Cost-Benefit Analysis?,” n.d.

SIRIMQAS. “Guidlines for the Importation and Inspection of Metal Scrap,” January 2022. <https://www.sirim-qas.com.my/wp-content/uploads/2022/01/Guidelines-for-Importation-and-Inspection-of-Metal-Scrap-rev07012022-CLEANCOPY.pdf>.

“Thailand’s Plastic Waste Ban Won’t Help Locals For Decades.” Accessed March 29, 2021. <https://www.bloomberg.com/features/2022-thailand-plastic-waste-recycling-import-ban/>.

“Trade Map - List of Exporters for the Selected Product in 2022 (Waste, Parings and Scrap, of Plastics).” Accessed March 29, 2021. https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c3915%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

“Trade Map - List of Supplying Markets for a Product Imported by Indonesia.” Accessed March 29, 2021. https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c360%7c%7c%7c%7c3915%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1.

Uhm, Yeeun. “PLASTIC WASTE TRADE IN SOUTHEAST ASIA AFTER CHINA’S IMPORT BAN: IMPLICATIONS OF THE NEW BASEL CONVENTION AMENDMENT AND RECOMMENDATIONS FOR THE FUTURE.” *California Western Law Review* 57, no. 1 (2021).

-
- Varkkey, Helena. "By Exporting Trash, Rich Countries Put Their Waste out of Sight and out of Mind." Accessed March 29, 2021. <https://edition.cnn.com/2019/07/29/opinions/by-exporting-trash-rich-countries-put-their-waste-out-of-sight-and-out-of-mind-varkkey/index.html>.
- "Waste Trade Bites: Vietnam Waste Woes | Break Free From Plastic." Accessed March 29, 2021. <https://www.breakfreefromplastic.org/2022/05/09/waste-trade-bites-vietnam-waste-woes/>.
- Wen, Zongguo, Yiling Xie, Muhan Chen, and Christian Doh Dinga. "China's Plastic Import Ban Increases Prospects of Environmental Impact Mitigation of Plastic Waste Trade Flow Worldwide." *Nature Communications* 12, no. 1 (January 18, 2021): 425. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-20741-9>.
- Williams, Corin. "Indonesia to Allow Waste Imports with 2% Contamination Limit." *MRW* (blog), July 19, 2021. <https://www.mrw.co.uk/news/indonesia-to-allow-waste-imports-with-2-contamination-limit-19-07-2021/>.
- Xia, Ying, and I Introduction. "CHINA'S ENVIRONMENTAL CAMPAIGN: HOW CHINA'S 'WAR ON POLLUTION' IS TRANSFORMING THE INTERNATIONAL TRADE IN WASTE" 51 (n.d.).
- Yale E360. "Piling Up: How China's Ban on Importing Waste Has Stalled Global Recycling." Accessed March 29, 2021. <https://e360.yale.edu/features/piling-up-how-chinas-ban-on-importing-waste-has-stalled-global-recycling>.